

Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa

Anggun Aswita Putri¹, Muhammad Anshari²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: anggunaswita03@gmail.com, muhammadanshari@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

7 April 2026

Disetujui:

1 Juli 2026

Terbit daring:

10 Juli 2026

DOI: -

Sitasi:

Putri, A. A. & Anshari, M. (2026). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.

Abstract:

Income inequality remains a major obstacle to economic development in Java, which has a high concentration of economic activities. This study aims to analyze the effect of government spending on education, health, and social protection on income inequality, with economic spending and GRDP as control variables, during 2015–2024. Panel data from six provinces were analyzed using beta regression because the dependent variable is the Gini ratio. The results show that spending on education and social protection has a positive and significant effect on inequality, while health spending and GRDP have a negative and significant effect. Economic spending as a control variable also has a positive significant effect. These findings indicate that government budget allocation and regional economic growth play a key role in income distribution and human and social development. Therefore, budget allocation should focus on targeting education and social protection programs effectively, integrated with productive economic policies to sustainably reduce income inequality.

Keywords: income inequality, government expenditure, GRDP, fiscal policy, Gini ratio.

Abstrak:

Ketimpangan pendapatan menjadi hambatan utama pembangunan ekonomi di Pulau Jawa yang memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan, dengan belanja ekonomi dan PDRB sebagai variabel kontrol, pada periode 2015–2024. Data panel enam provinsi dianalisis menggunakan regresi beta karena variabel dependen berupa rasio Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan perlindungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan belanja kesehatan dan PDRB berpengaruh negatif signifikan. Belanja ekonomi sebagai variabel kontrol juga berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berperan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan manusia serta sosial. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran sebaiknya diarahkan agar program pendidikan dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran, disertai integrasi dengan kebijakan ekonomi produktif untuk menurunkan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

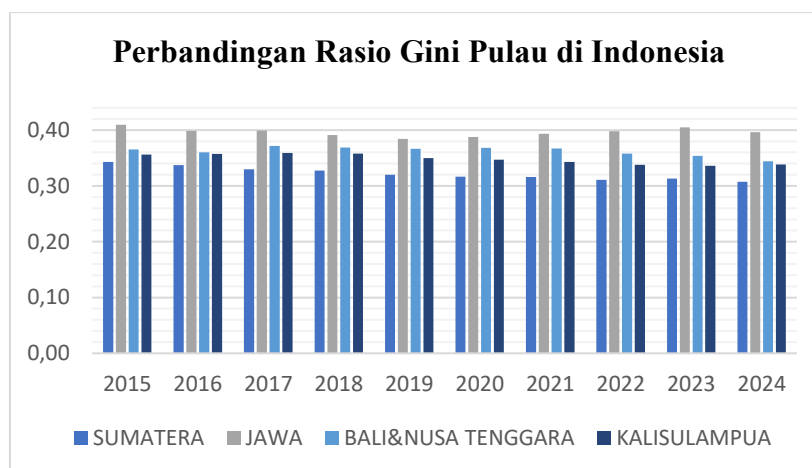
Kata Kunci: ketimpangan pendapatan, belanja pemerintah, PDRB, kebijakan fiskal, rasio gini

Kode Klasifikasi JEL: D31, H51, H52, H53, R11

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana distribusi pendapatan masyarakat dapat diperbaiki sehingga menciptakan pemerataan kesejahteraan (Karim dkk., 2023). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan, namun tetap menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Pulau Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Ketimpangan pendapatan biasanya diukur menggunakan rasio Gini, yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Perubahan nilai rasio Gini dari waktu ke waktu mencerminkan dinamika distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah, termasuk alokasi belanja pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB. Dengan demikian, rasio Gini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dalam menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Shaltynov dkk., 2024).

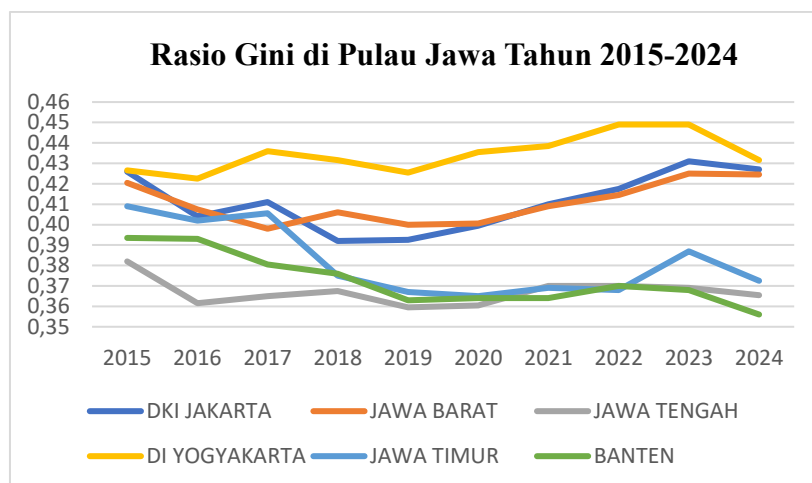


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2015-2024

Gambar 1 Perbandingan Rata-Rata Rasio Gini Pulau di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, namun terdapat perbedaan yang jelas antarwilayah. Pulau Jawa mencatat rasio Gini tertinggi dibandingkan pulau lainnya, menandakan bahwa sebagian besar pendapatan dan peluang ekonomi di wilayah ini terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Meskipun aktivitas ekonomi di Pulau Jawa terus meningkat, sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata. Sementara itu, pulau lain seperti Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan rasio Gini yang lebih rendah, yang menandakan ketimpangan pendapatan relatif lebih kecil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saja tidak cukup untuk menciptakan pemerataan, karena faktor distribusi dan alokasi sumber daya juga menentukan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama terhadap perekonomian nasional. Namun, tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di beberapa provinsi juga menimbulkan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan, terutama di provinsi dengan tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, termasuk pengelolaan belanja pemerintah dan alokasi sumber daya yang mendukung pemerataan. Dengan langkah-langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat meningkatkan total output, tetapi juga mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih adil (Shaltynov dkk., 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016-2024

Gambar 2 Rasio Gini di Pulau Jawa Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 2, Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki jumlah penduduk terbesar, distribusi pendapatan antarprovinsi masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari rasio Gini yang lebih tinggi di provinsi seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Banten, yang menandakan konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ketimpangan ini terkait dengan mekanisme pasar yang tidak selalu mampu mendistribusikan pendapatan secara adil. Kelompok yang memiliki modal, pendidikan, keterampilan, dan akses ekonomi yang lebih baik cenderung memperoleh manfaat pembangunan lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Dalam ekonomi publik, situasi ini dikenal sebagai kegagalan pasar (*market failure*), di mana pasar tidak dapat menyelesaikan persoalan distribusi kesejahteraan secara optimal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran publik diperlukan untuk menurunkan kesenjangan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung (Woldegiorgis, 2022).

Belanja pemerintah menurut fungsi memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Pengeluaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses ekonomi bagi masyarakat. Belanja pendidikan diharapkan meningkatkan keterampilan dan kapasitas manusia, sementara belanja kesehatan mendukung produktivitas masyarakat, dan perlindungan sosial menjaga daya beli kelompok rentan. Kebijakan fiskal semacam ini juga selaras dengan konsep *pro-poor spending*, di mana pengeluaran diarahkan untuk kelompok berpendapatan rendah sehingga dapat membantu memperbaiki distribusi pendapatan (Hassan dkk., 2021).

Selain kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memengaruhi ketimpangan pendapatan. PDRB menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah dari kegiatan produksi barang dan jasa, namun peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan jika manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu. Oleh karena itu, kombinasi antara alokasi belanja pemerintah yang tepat sasaran dan pertumbuhan PDRB yang inklusif diperlukan untuk menciptakan pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana belanja

pemerintah menurut fungsi serta PDRB memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2016–2024 (Mardiyah & Fitrawaty, 2025).

Teori Ketimpangan Pendapatan (Kuznets)

Dalam teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Simon Kuznets melalui hipotesis kurva U-terbalik (*inverted-U hypothesis*) menjelaskan hubungan nonlinier antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan karena manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau wilayah yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan sumber daya produktif. Namun, seiring meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi, kesempatan kerja semakin luas, kualitas sumber daya manusia membaik, dan distribusi aktivitas ekonomi menjadi lebih merata, sehingga ketimpangan mulai menurun. Titik balik ini menandai fase di mana peningkatan pendapatan per kapita yang sebelumnya mendorong kenaikan ketimpangan mulai berkontribusi pada pemerataan pendapatan, membentuk pola kurva U-terbalik. Fenomena ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan ekonomi, kapasitas institusi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata (Todaro & C Smith, 2011).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan. Belanja publik yang dialokasikan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik, tetapi juga memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan (Hassan dkk., 2021). Besaran dan komposisi belanja pemerintah mencerminkan prioritas kebijakan publik serta efektivitas intervensi negara dalam perekonomian. Menurut teori keuangan publik Musgrave, peran pemerintah mencakup tiga fungsi utama: fungsi alokasi untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi sektor swasta, fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan melalui bantuan sosial, subsidi, dan pajak progresif, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui belanja negara dan instrumen fiskal lainnya (Putra dkk., 2025). Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai sarana strategis dalam mendorong pembangunan manusia dan sosial, sekaligus menjadi instrumen penting untuk menekan ketimpangan pendapatan di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian keuangan. Data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* mencakup enam provinsi di Pulau Jawa, sedangkan data *time series* meliputi periode tahun 2015–2024. Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, yang diukur menggunakan koefisien Gini. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen		
Ketimpangan Pendapatan	Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara penduduk suatu wilayah, diukur menggunakan rasio Gini sebagai indikator pemerataan ekonomi. Sumber data : Badan Pusat Statistik.	Indeks (0-1)
Variabel Independen		
Belanja Fungsi Pendidikan	Dana APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan oleh pemerintah daerah, termasuk gaji tenaga pendidik, namun tidak mencakup pendidikan kedinasan Sumber data : Kementerian Keuangan	Rupiah (Rp) / Log
Belanja Fungsi Kesehatan	Anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan Masyarakat Sumber data : Kementerian Keuangan	Rupiah (Rp) / Log
Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	Dana APBD yang diperuntukkan bagi program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan Sumber data : Kementerian Keuangan	Rupiah (Rp) / Log
Belanja Fungsi Ekonomi	Alokasi anggaran daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi local Sumber data : Kementerian Keuangan	Rupiah (Rp) / Log
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode waktu tertentu sebagai indikator aktivitas ekonomi. Sumber data : Badan Pusat Statistik.	Rupiah (Rp) / Log

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif berupa data panel dari enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Sumber data diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sehingga memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 17, dengan pendekatan regresi beta untuk menangani variabel dependen berbentuk proporsi, yaitu rasio Gini, yang memiliki nilai terbatas antara 0 dan 1 (Ferrari & Cribari-neto, 2004).

Model regresi beta yang digunakan menghubungkan nilai ekspektasi ketimpangan pendapatan (μ_{it}) dengan belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menggunakan fungsi link logit untuk mentransformasikan data ke domain bilangan real. Persamaan model dapat dituliskan sebagai:

$$\text{Logit } g(\mu_{it}) = \beta_0 + \beta_2 X_{BFP_{it}} + \beta_3 X_{BFK_{it}} + \beta_4 X_{BFPS_{it}} + \beta_1 X_{BFE_{it}} + \beta_6 X_{PDRB_{it}} \quad (1)$$

Dimana μ_{it} merupakan nilai ekspektasi dari ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Rasio Gini pada provinsi ke- i pada tahun ke- t . Variabel X_{BFP} merupakan Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan, X_{BFK} merupakan Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan, X_{BFPS} menunjukkan Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, sedangkan X_{BFE} menunjukkan Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi pada provinsi ke- i pada tahun ke- t . Selanjutnya X_{PDRB} merupakan Produk Domestik Regional Bruto pada provinsi ke- i pada tahun ke- t . Parameter $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, dan β_5 merupakan parameter regresi yang akan hitung menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan.

Model diuji menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai di bawah 10 menandakan tidak ada masalah multikolinearitas. Signifikansi variabel diuji secara parsial dengan uji t dan simultan menggunakan uji Wald, sementara koefisien determinasi (R^2) menilai seberapa besar variasi ketimpangan pendapatan yang dijelaskan oleh variabel independen. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan alokasi belanja pemerintah, kinerja ekonomi daerah, dan ketimpangan pendapatan secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Diagnostik Data

Uji Multikorelasi

Hasil uji VIF menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai di bawah 10, menandakan tidak ada multikolinearitas yang serius dan model regresi tetap stabil untuk dianalisis.

Tabel 2 Hasil Uji Multikorelasi

Variabel	VIF
PDRB	8.57
Belanja Pendidikan	7.42
Belanja kesehatan	6,39
Belanja perlindungan sosial	5,71
Belanja Ekonomi	3,76
Mean VIF	6.37

Sumber : Olah Data (Stata 17), 2026

Hasil Estimasi Model Regresi Beta

Tabel 3 Hasil Estimasi Regresi Beta

Variabel	Koefisien	Std.Error	Z	P-value
Belanja Fungsi Pendidikan	0.078701	0.032927	2.39	0.017
Belanja Fungsi Kesehatan	-0.05464	0.019742	-2.77	0.006
Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	0.048262	0.024165	2.00	0.046
Belanja Fungsi Ekonomi	0.06065	0.018938	3.2	0.001
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0.1218	0.029347	-4.15	0.000
Konstanta	0.0017656	0.412245	0.00	0.997
Log Likelihood	153.20876			
LR Chi2 (5)	41,98			
Prob>Chi2	0,0000			

Sumber : Olah Data (Stata 17), 2026

Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi beta pada Tabel 3, persamaan model

dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$(\mu_{it}) = 0,0017656 + 0,0787008BFP_{it} - 0,0546437BFK_{it} + 0,0482621BFS_{it} + 0,0606499BFE_{it} - 0,1217989PDRB_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi beta, nilai konstanta sebesar 0,0018 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen, yaitu belanja fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, dan PDRB, tidak memengaruhi, maka nilai ekspektasi rasio Gini atau tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa mendekati 0,18%. Koefisien variabel independen menjelaskan arah dan besarnya pengaruh masing-masing. Peningkatan belanja fungsi pendidikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0787, sedangkan peningkatan belanja fungsi kesehatan sebesar 1 satuan justru menurunkan ketimpangan sebesar 0,0546. Selanjutnya, belanja fungsi perlindungan sosial meningkat 1 satuan berkontribusi pada kenaikan ketimpangan sebesar 0,0483, sementara belanja fungsi ekonomi sebagai variabel kontrol meningkat 1 satuan akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,0606. Terakhir, peningkatan PDRB sebesar 1 satuan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,1218, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan, terutama apabila pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata, dengan asumsi ceteris paribus.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan melalui dua tahap pengujian, yaitu Uji Wald untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan dan Uji Likelihood Ratio (LR) untuk menguji pengaruh secara parsial.

Uji Wald

Berdasarkan hasil regresi beta dengan Uji Wald menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan memiliki koefisien sebesar 0,0787 dengan p-value 0,017 dan belanja fungsi perlindungan sosial memiliki koefisien 0,0483 dan p-value 0,046 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada kedua fungsi tersebut cenderung diikuti kenaikan ketimpangan, kemungkinan karena distribusi manfaat yang belum merata di seluruh kelompok masyarakat. Sebaliknya, belanja fungsi kesehatan memiliki koefisien sebesar -0,0546 dengan p-value 0,006 dan PDRB dengan koefisien -0,1218 dan p-value 0,000 berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan keduanya dapat menurunkan ketimpangan melalui pemerataan akses layanan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Belanja fungsi ekonomi sebagai variabel kontrol juga menunjukkan pengaruh positif signifikan memiliki koefisien 0,0606 dengan p-value 0,001, yang berarti manfaat pengeluaran ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu sehingga ikut meningkatkan ketimpangan. Secara keseluruhan, sebagian besar variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, dengan arah pengaruh positif atau negatif sesuai karakteristik masing-masing variabel, yang menegaskan peran penting kebijakan fiskal dan kinerja ekonomi daerah dalam membentuk distribusi pendapatan (Putra dkk., 2025).

Uji Likelihood Ratio

Uji Likelihood Ratio (LR Test) menunjukkan bahwa model regresi beta layak digunakan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, dengan nilai LR Chi²

(5) = 41,98 dan p-value 0,0000. Hasil ini menegaskan bahwa belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan selama periode 2015–2024. Temuan ini menandakan bahwa perubahan ketimpangan tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel saja, melainkan merupakan hasil interaksi beberapa faktor sekaligus, sehingga model regresi beta yang digunakan valid untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi daerah terhadap distribusi pendapatan (Hassan dkk., 2021).

Interpretasi Hasil Penelitian

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Pendidikan

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,078701 dengan p-value 0,017, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa belanja pendidikan belum mampu menjalankan fungsi distribusi secara optimal karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, sarana pendukung, serta teknologi pembelajaran, terutama pada masa pandemi COVID-19. Akibatnya, peningkatan anggaran pendidikan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok yang telah memiliki sumber daya yang memadai sehingga dampaknya terhadap pemerataan pendapatan menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan (Artige & Cavenaile, 2023) serta (Voto & Ngepah, 2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan tidak selalu mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Hassan dkk. (2021) yang menemukan bahwa belanja pendidikan dapat menurunkan ketimpangan apabila dialokasikan secara optimal dan tepat sasaran.

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Kesehatan

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar $-0,05464$ dengan p-value 0,006, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja kesehatan telah menjalankan fungsi distribusi pemerintah melalui peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi kesehatan yang lebih baik mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Secara ekonomi, peningkatan belanja kesehatan selama periode penelitian, terutama pada masa pandemi COVID-19, membantu memperluas akses layanan kesehatan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan Carraro & Marzi (2021) serta Zerihun (2025) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Mardhiyah & Fitrawaty (2025) yang menemukan bahwa peningkatan pembangunan sosial tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan.

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, belanja pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,048262 dengan p-value 0,046, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja perlindungan sosial cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja perlindungan sosial belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi redistribusi pendapatan secara optimal, karena manfaat program yang diberikan masih belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Secara ekonomi, belanja perlindungan sosial selama periode penelitian, terutama pada masa pandemi COVID-19, berperan dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Namun, karena sebagian besar program bersifat jangka pendek dan lebih berfokus pada stabilisasi konsumsi, dampaknya terhadap pemerataan pendapatan masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan Banerjee dkk. (2024) dan Light dkk. (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi konsumsi sehingga pengaruhnya terhadap ketimpangan bergantung pada ketepatan sasaran dan cakupan program. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Carraro dan Marzi (2021) yang menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial berpotensi mengurangi ketimpangan melalui mekanisme redistribusi pendapatan.

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,0606407 dengan p-value 0,001, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja fungsi ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pada fungsi ekonomi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

Secara ekonomi, kondisi ini terjadi karena belanja fungsi ekonomi umumnya diarahkan pada sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan, dan investasi, yang manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh wilayah atau kelompok masyarakat yang telah memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, dampak terhadap pemerataan pendapatan menjadi relatif terbatas. Temuan ini sejalan dengan Hassan et al. (2021) dan Mao (2025) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah pada sektor ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam kondisi tertentu juga berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Prannisa (2023) yang menemukan bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar $-1,12179$ dengan p-value 0,000, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa berpotensi mendorong pemerataan pendapatan apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Secara ekonomi, peningkatan PDRB mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan kapasitas ekonomi daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, kelompok berpendapatan rendah juga akan memperoleh manfaat sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang. Temuan ini sejalan dengan Panggabean (2025) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan apabila disertai pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Mardhiyah dan Fitrawaty (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Pengaruh Simultan Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi regresi beta, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai LR Chi² sebesar 41,98 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak serta mampu menjelaskan pengaruh seluruh variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan.

Secara ekonomi, temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara kebijakan belanja pemerintah pada berbagai fungsi dan kondisi perekonomian daerah yang tercermin melalui PDRB. Dengan demikian, efektivitas upaya mengurangi ketimpangan memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui pengalokasian belanja pemerintah yang tepat sasaran serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015–2024 dengan menggunakan metode regresi beta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pada ketiga fungsi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pendapatan karena manfaatnya masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat atau wilayah yang memiliki akses ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik.

Sebaliknya, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan mampu mendukung pemerataan melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan produktivitas masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, PDRB juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan apabila diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh daerah.

Secara simultan, belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, serta PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari hubungan antara kebijakan belanja

pemerintah dan kondisi perekonomian daerah. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketimpangan pendapatan memerlukan pengelolaan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran serta kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara lebih merata kepada seluruh lapisan Masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Artige, L., & Cavenaile, L. (2023). *Public education expenditures, growth and income inequality*.
- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Lisker, D. S. (2024). *Social protection in the developing world* (No. 1745302).
- Carraro, L., & Marzi, M. S. L. (2021). *Effects of social protection on poverty and inequality*.
- Ferrari, S., & Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. *Journal of Applied Statistics*, 31(7), 799–815. <https://doi.org/10.1080/0266476042000214501>
- Hassan, M., Alizadeh, M., & Ahmadvand, N. (2021). Optimal amount of government expenditure components with the goal of reducing income inequality: The case of Iran. *Iranian Journal of Economic Studies*, 9(1), 117–146. <https://doi.org/10.22099/ijes.2021.38897.1721>
- Light, C., Nwaobia, G. E., & Nwobia, L. I. (2024). Effects of conditional and unconditional cash transfers on poverty reduction, education, and health outcomes in Sub-Saharan Africa: A PRISMA approach. *Journal of Poverty*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2426807>
- Mao, L. (2025). Fiscal vertical imbalance and income inequality: A threshold effect analysis based on government expenditure. *PLOS ONE*, 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317537>
- Mardhiyah, A., & Fitrawaty. (2025). Determinant of income inequality: Empirical study of 34 provinces in Indonesia moderated by investment. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(1), 334–354.
- Panggabean, M. (2025). Income inequality in Indonesia and its influencing factors. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 4069–4082. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7444>
- Prannisa, A. (2023). Government spending (economy, social protection, health, education) on income inequality in West Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 26–32.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis peran pemerintah dalam perekonomian nasional melalui tiga fungsi utama fiskal: Alokasi, distribusi, dan stabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(6), 408–416.
- Shaltynov, A., Jamedinova, U., Semenova, Y., & Abenova, M. (2024). Inequalities in out-of-pocket health expenditure measured using financing incidence analysis (FIA): A systematic review.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi* (Ed. ke-11). Erlangga.
- Voto, T. P., & Ngepah, N. (2024). Income inequality: The effects of public education expenditure and information and communications technology in Sub-Saharan Africa.
- Woldegiorgis, M. M. (2022). Inequality, social protection policy, and inclusion: Pertinent theories and empirical evidence. *Journal of Social and Economic Development*, 24(2), 241–265. <https://doi.org/10.1007/s40847-022-00185-1>
- Zerihun, M. F. (2025). Impact of public expenditure on income inequality: A comparative evidence from low- and lower-middle-income Sub-Saharan African economies. *Cogent Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2594187>